

PERAN *PUBLIC RELATION* SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA DALAM MENUNJANG TRANSPARANSI INFORMASI DAERAH

N a s t i a

(Dosen FISIP, Universitas Muhammadiyah Buton)

Email: tia_nas21@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the role of Public Relation (PR) in the management of information in the Regional Secretariat of North Buton Regency, especially in supporting the transparency of Regional information. The data used are primary data obtained directly from informants and secondary data. The research method is descriptive qualitative, with the intention to provide a factual description of the Role of Public Relation of North Buton Regency Secretariat in Supporting Transparency of Regional Information. The results of this study indicate the existence of several stages of the role that has been implemented by the Public Relations Secretariat of North Buton Regency.

Key Word: Transparency, Public Relation

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *Public Relation* (PR) dalam pengelolaan informasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara khususnya dalam menunjang transparansi informasi daerah. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif, dengan maksud agar dapat memberikan suatu gambaran faktual tentang peran *Public Relation* Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam menunjang transparansi informasi daerah. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan adanya beberapa tahapan peran yang telah dilaksanakan oleh Humas Kesekretariatan Daerah Kabupaten Buton Utara.

Kata Kunci: Transparansi, Public Relation

PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Pemerintah pada Kamis 3 April 2008, membawa konsekuensi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi hak atas informasi bagi warga negara Indonesia. Badan publik dalam hal ini adalah lembaga-lembaga negara, lembaga publik non pemerintah, dan perusahaan-perusahaan publik yang mendapat dana alokasi dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan himpunan masyarakat mempunyai kewajiban untuk

memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik di Indonesia.

Tuntutan Reformasi birokrasi yang menekankan adanya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Adalah regulasi perundang-undangan yang

diantaranya mendukung salah satu bidang informasi yang erat dengan nilai keterbukaan pada seluruh kepentingan publik. Pelayanan Publik menjadi sentral kebijakan reformasi birokrasi yang memiliki kompleksitas dan posisi yang sangat strategis karena perbaikan pelayanan publik dimata masyarakat masih dipandang berjalan ditempat sehingga tujuan akhir dari pelayanan publik, yaitu guna mewujudkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat belum terwujud. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informasi memiliki peran penting dalam mengawal Reformasi Birokrasi sebab reformasi Birokrasi bertujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui Humasnya atau *Public Relation* (PR). *Public relations* adalah suatu fungsi manajemen yang mengenai sikap publik, menunjukkan kebijaksanaan publik dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dengan pengakuan dari publik, Glen dan Danny Griswold (Abdurahman, 1995:25). Tidak hanya itu Humas juga sebagai kegiatan komunikasi antara sebuah organisasi dengan berbagai publiknya, Guning dan Hunt (1984:6). Perkembangan *Public Relation* (PR) saat ini maju dengan pesatnya. Setiap instansi dipastikan membutuhkan praktisi *Public Relation* (PR). Keberadaannya sangat dibutuhkan karena *Public Relation* (PR) mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu instansi tersebut. Kemajuan dan kemunduran instansi itu tergantung dengan kinerja *Public Relation* (PR) sendiri. *Public Relation* (PR) merupakan profesi yang menjadi mediator antara lembaga yang diwakilinya dengan para *public* baik

eksternal maupun internal. *Public Relation* (PR) seyogyanya bisa membangun hubungan baik dengan mereka, karena hal ini nantinya bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan kata lain ciri khas dari *Public Relation* (PR) adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik (*two way communication*) antara lembaga dengan *public* yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi terciptanya suatu tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi barang/pelayanan jasa dan sebagainya. Demi kemajuan instansi yang bersangkutan. *Public Relation* (PR) tidak hanya memberikan informasi kepada publiknya akan tetapi, *Public Relation* (PR) juga menerima informasi dari publiknya. Oleh karena itu masing-masing pihak akan mengetahui keinginan pihak yang lainnya. Proses komunikasi yang dilakukan oleh *Public Relation* (PR) pada sebuah instansi adalah hal yang sangat penting dimana peran *Public Relation* (PR) tersebut bukanlah sebuah tugas yang mudah dan sepele yang bisa dilaksanakan secara personal tanpa adanya kerjasama dari sebuah tim yang solid serta tanpa sebuah rencana kerja yang efektif, efisien, dan komprehensif, dan juga didukung oleh orang-orang yang ahli dibidang ini.

Oleh sebab itu *Public Relation* (PR) memegang peranan penting dalam sebuah instansi, Menurut Dozier dan Broom, “peranan *Public Relation* (PR) ada empat kategori diantaranya: sebagai penasehat ahli (*expert prescriber*), fasilitator komunikasi (*communication fasilitator*), fasilitator proses pemecahan masalah (*problem solving process fasilitator*), dan teknisi komunikasi (*communication technician*)”.

Peranan-peranan di atas bisa dijadikan sebagai bahan pedoman untuk menyukseskan program-program yang sedang dilakukan serta sebagai bekal untuk

meningkatkan kinerja *Public Relation* (PR) Tidak hanya instansi berskala kecil, lembaga besar juga sangat membutuhkan akan jasa *Public Relation* (PR), karena disuatu lembaga itu bisa dipastikan memiliki banyak kepentingan dan tanggung jawab sosial, setiap publik pasti memiliki keinginan, kebutuhan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Bahkan dari keinginan itu bisa menjadi konflik bagi instansi itu sendiri yang dikhawatirkan bisa mengganggu kestabilan instansi tersebut apabila tidak dicari pemecahannya secara cepat dan akurat. Oleh karena itu sekali lagi praktisi *Public Relation* (PR) dituntut untuk menciptakan kerjasama dengan dasar hubungan baik dengan publiknya. Secara sederhana tugas *Public Relation* (PR) bisa dikatakan mentransformasi sebuah informasi dari instansi kepada public.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, sistem informasi juga mengalami kemajuan yang begitu cepat. Berbagai macam informasi saat ini, tidak dipungkiri bisa dijadikan suatu kebutuhan oleh masyarakat di dalam kehidupan. Baik dalam kegiatan perekonomian, kebudayaan, sosial, maupun pembangunan. Selain untuk masyarakat itu sendiri, keberadaan informasi juga sangat mendukung dalam peningkatan efisiensi serta produktivitas suatu instansi, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Selain itu sistem informasi saat ini juga dirancang dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, sehingga sistem informasi sekarang diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan. Oleh karena itu informasi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat luas yang berada di daerah. Pembangunan merupakan sebuah proses, yang tidak bisa langsung berkembang dalam waktu yang relatif singkat.

Humas pemerintah diklasifikasikan menjadi Humas pemerintah pusat dan Humas Pemerintah Daerah, kedua-duanya menurutnya mempunyai tugas yang sama, walaupun ruang lingkupnya berbeda. Tugas Humas pemerintah pertama menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan perencanaan dan hasil yang telah dicapai, kedua menerangkan dan mendidik mengenai perundang-undangan, peraturan-peraturan dan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rakyat sendiri, Sam Black (Effendy, 1999:3:7). Dalam undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah dibuka saluran baru bagi pemerintah propinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ada empat tujuan utama Humas Pemerintahan Daerah yaitu: (a) Memelihara penduduk agar tahu jelas mengenai kebijaksanaan lembaga beserta kegiatan sehari-hari. (b) Memberi kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pandangan mengenai proyek baru yang penting sebelum lembaga mengambil keputusan. (c) Memberikan penerangan kepada penduduk mengenai cara pelaksanaan sistem Pemerintahan daerah dan mengenai hak-hak dan tanggungjawab mereka. (d) Mengembangkan rasa bangga sebagai warga Negara, Sam Black (Effendy, 1999:39). Dalam hal ini telah diaplikasikan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Kabupaten Buton Utara Propinsi Sulawesi Tenggara meskipun hanya sebagian dari misi pemerintah. Apabila informasi pembangunan ini nantinya bisa dimengerti dan dipahami oleh para masyarakat, maka praktisi *Public Relation* (PR) bisa mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Buton Utara.

Sebagaimana diketahui bahwa Sekretariat Daerah merupakan instansi pemerintahan, maka *Public Relation* (PR) disini bisa dikatakan sebagai *Public Relation* (PR) pemerintahan bukan seperti *Public Relation* (PR) perusahaan pada umumnya karena Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara merupakan wakil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara yang akan mendistribusikan semua informasi kepada masyarakat luas yang ada di Kabupaten Buton Utara maupun masyarakat di Propinsi Sulawesi Tenggara. Oleh sebab itu *Public Relation* (PR) yang terdapat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara perlu mengerti tujuan dan program pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Ia dituntut memiliki pengetahuan mengenai sistem pemerintahan

di daerah Kabupaten Buton Utara beserta seluk beluknya. Hal ini disebabkan karena *Public Relation* (PR) Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara harus bertindak sebagai juru bicara pemerintah Kabupaten Buton Utara, sehingga SDM yang berada di bidang Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Utara adalah mereka yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang *Public Relation* (PR) agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi, kesalahan yang dimaksud adalah penyampaian informasi yang tidak menimbulkan salah pengertian di masyarakat sehingga perlu untuk diperhatikan. Olehnya itu perlu untuk dilakukan penelitian tentang Peran *Public Relation* Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam Menunjang Transparansi Informasi Daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dengan maksud agar dapat memberikan suatu gambaran faktual tentang Peran *Public Relation* Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam Menunjang Transparansi Informasi Daerah. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008:246) data kualitatif dianalisis dalam beberapa tahapan, yaitu: (1) *Data Reduction* (Reduksi Data). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. (2) *Data Display* (Penyajian Data). Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (3) *Conclusion drawing verification*. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi, laporan-laporan dan arsip-arsip lain yang relevan dan studi pustaka. Studi analisis data pada Bidang Humas Sekretarian Daerah Kabupaten Buton Utara.

HASIL DAN ANALISIS

Peran Bidang *Public Relation* (PR) Humas pada Sekretariat Daerah Buton Utara bukan sekedar menyebarkan informasi daerah. Bidang *Public Relation* (PR) Humas

pada Sekretariat Daerah Buton Utara adalah sebagai alat manajemen yang kuat yang dapat membangun reputasi pemerintah daerah, membentuk dan mempengaruhi

opini publik, dan yang paling penting, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Cutlip dan Center melalui bukunya *Effective Public Relations* dalam buku *Public Relation & Crisis Management* karangan Rahmat Kriyantono (2010: 30), menyatakan bahwa “Bagian *Public Relation* sebagai fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Peran Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam Menunjang Transparansi Informasi Daerah, diantaranya: 1) Penasihat Ahli (*Expert Prescriber*). Selain sebagai penasihat ahli humas sekretariat daerah Kabupaten Buton utara juga berfungsi sebagai: (a) Praktisi Bidang Komunikasi dan Informasi Humas Sekretariat Daerah yang memiliki pengalaman dan kemampuan tinggi, dapat mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan Pemerintah Daerah dengan publiknya melalui kegiatan *community development* yang dalam hal ini adalah masyarakat Buton Utara. (b) Memfasilitasi dan menjembatani komunikasi dua arah atau timbal-balik yang intensif antara pemerintah Daerah dan masyarakat guna mendukung terciptanya tujuan Pemerintah Kabupaten Buton Utara serta terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Buton Utara melalui penyebaran berita lewat media, baik media cetak maupun media elektronik. 2) Fasilitator Komunikasi (*Commentator Facilitator*) yaitu: (a) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas pokok, fungsi aktivitas dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah daerah atau kebijakan di masing-masing satuan kerja atau satuan kerja perangkat daerah. (b) Menangkap aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada pemerintah atau

satuan kerja di jajaran masyarakat. (c) Mewujudkan integrasi, kreasi dan keselarasan antara kepentingan pemerintah/instansi dan kepentingan masyarakat. 3) Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Facilitator*), pada bagian ini, Bidang Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara juga berperan sebagai fasilitator proses pemecahan masalah, yaitu bagaimana Bidang Humas mampu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara, baik secara proaktif, antisipatif, inovatif, dinamis, dan solutif terhadap masyarakat dan berperan aktif untuk mengatasi permasalahan yang sedang pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara hadapi. Tentunya juga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak seperti dukungan dan bantuan kerjasama dalam rangka membina hubungan kerja yang serasi dan dinamis antara pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara dengan organisasi sosial, organisasi profesi dan kelompok masyarakat antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka menciptakan dan peningkatan komunikasi dua arah, memantau, menampung dan menyalurkan aspirasi dan opini yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada secara bijaksana, dengan memperhatikan kepentingan bersama, antara pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara dengan masyarakat. 4) Teknisi Komunikasi (*Communication Technician*), pada teknisi komunikasi humas sekretariat daerah kabupaten buton utara juga melakukan: (a) Pelayanan informasi dan dokumentasi, mengumpulkan, mengelola, mendokumentasikan dan mempublikasikan informasi kebijakan, program dan kegiatan baik dalam bentuk cetakan, foto, maupun data elektronik dalam melayani publik terhadap penyebaran informasi daerah

Kabupaten Buton Utara dan (b) Membentuk pusat layanan informasi publik untuk melayani permohonan informasi publik dilingkungan pemerintah kabupaten membuat siaran pers, melaksanakan konferensi pers atau jumpa pers, menulis, menyunting dan memodifikasi informasi publik, menyusun dan mendistribusikan sajian berita dalam bentuk foto, video dan berbagai artikel untuk kebutuhan publik membuat konsep dan menyusun materi informasi publik yang akan dipublikasikan melalui teknologi informasi milik bagian hubungan masyarakat.

Sebagai publisitor dalam penyebarluasan informasi pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara, maka Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara melakukan berbagai cara sebagai upaya menciptakan iklim yang kondusif yaitu melalui pendekatan edukatif dan persuasif serta pendekatan kerjasama dengan pembahasan sebagai berikut:

Pendekatan Edukatif dan Persuasif

Pendekatan edukatif dan persuasif merupakan upaya Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat dengan menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan maupun dengan pendekatan persuasif (mengajak/membujuk khalayak) agar tercipta saling pengertian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Kabupaten Buton Utara, Yudi Ardiansyah menyatakan:

“Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara melakukan pendekatan edukatif dan persuasif ke masyarakat yaitu melalui media komunikasi Bidang Komunikasi dan Informasi. Media komunikasi Bidang Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah Buton Utara

terdiri dari surat kabar yang khusus menginformasikan hal-hal yang terjadi di wilayah Buton Utara dan sekitarnya, radio, TV, bahan-bahan cetakan seperti Buletin Organisasi dan Baliho, dan media internet.” (Wawancara 12 November 2016)

Menurut Ibu LZ, masyarakat Kabupaten Buton Utara, menyatakan bahwa:

“Ada beberapa desa yang sempat saya lewati yang banyak terlihat baliho-baliho saja, sayangnya baliho yang dipasang hanya memperkenalkan pemimpin yang ada dengan visi mereka, sementara untuk pembangunan yang sedang dilakukan atau sudah dilakukan tidak terlihat pada baliho-baliho yang dipasang, sementara media lainnya pun masih terbatas”. (Wawancara 12 November 2016)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diuraikan tentang media Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara yang digunakan dalam penyebarluaskan informasi pembangunan daerah yaitu dengan menggunakan Surat Kabar dan Media Elektronik. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara memanfaatkan surat-surat kabar lokal, media elektronik dan *online* dalam hal ini media *massa* yang memuat kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Kegiatan Pemerintah Daerah Buton Utara, dan surat-surat kabar provinsi yang menyediakan kolom khusus tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah (dalam hal ini artikel atau tulisan yang bernilai berita) pada halaman khusus, beberapa media massa daerah untuk disebarkan kepada masyarakat. Dalam hal ini Bidang Komunikasi dan Informasi Buton Utara banyak melakukan kerjasama dengan beberapa media *massa*.

Selain menggunakan media surat kabar, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara melakukan penyebaran informasi pembangunan daerah melalui berbagai bahan-bahan cetakan seperti baliho, buletin organisasi maupun *leaflet*. Untuk baliho, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara menggunakan media tersebut sebagai upaya menyampaikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buton Utara di dalamnya terdapat ucapan-ucapan, dukungan-dukungan yang berhubungan dengan pembangunan daerah Kabupaten Buton Utara agar diketahui masyarakat. Baliho ini diletakkan di tempat-tempat strategis dan di jalan-jalan raya.

Bahan-bahan cetakan lain yang digunakan Bidang Komunikasi dan Informasi Buton Utara adalah *leaflet*. *Leaflet* disebar pada saat acara pameran-pameran terutama pameran pembangunan, selain itu diberikan kepada tamu-tamu Bupati maupun tamu luar daerah dan tamu luar negeri yang berkunjung ke Kabupaten Buton Utara. *Leaflet* tersebut berisi profil terbentuknya Kabupaten Buton Utara dan perkembangan-perkembangan terbaru mengenai infrastruktur wilayah tersebut, daerah wisata dan jumlah penduduk di Kabupaten dan desa-desa di Kabupaten Buton Utara. Selain itu visi dan misi pembangunan serta struktur organisasi kepemimpinan di Kabupaten Buton Utara.

Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara juga melakukan penyebaran informasi pembangunan daerah yaitu dengan menggunakan media internet berupa *website*. *Website* ini dikelola langsung oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Buton Utara yang bertujuan untuk mengaktualisasikan komunikasi informasi baik secara intern maupun ekstern. *Website* yang dimiliki oleh

pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara beralamat www.butonutarakab.go.id. Dengan *website* ini, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara dapat mempublikasikan informasi yang *up to date* tentang segala hal yang berkaitan dengan Pemerintah Buton Utara maupun informasi pembangunan daerah. Bagi masyarakat, melalui *website* ini masyarakat dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan Pemerintah Buton Utara maupun informasi pembangunan daerah. Selain itu, *website* yang berisikan tentang Kabupaten Buton Utara juga dapat diakses di www.bappedabutonutara.com/

Berdasarkan wawancara terhadap masyarakat mengenai penyebaran informasi pembangunan di Buton Utara, Ibu Rn berpendapat bahwa:

“Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Buton Utara ini sudah cukup baik. Banyak sarana yang digunakan seperti penggunaan media cetak, *online*, ataupun media elektronik seperti koran Harian Buton Utara, website Bidang Komunikasi dan Informasi Buton Utara dan TV lokal. Hanya saja masih fokus di ibukota kabupaten padahal masih banyak wilayah-wilayah yang cukup jauh dari pusat kota Buton Utara yang sangat terlambat untuk mendapatkan perkembangan terbaru tentang penyebaran informasi perkembangan pembangunan daerah. Pihak pemerintah kabupaten setidaknya bisa menyebarluaskan informasi mengenai Pemerintah kabupaten beserta perkembangannya secara non formal disesuaikan dengan latar belakang situasi dan kondisi serta adat istiadat yang berlaku dimasing-masing wilayah Buton Utara itu sendiri. Misalnya saja pemerintah kabupaten Buton Utara bisa menggunakan koran Harian Buton Utara yang pendistribusiannya merata sampai ke desa-desa yang ada di wilayah Buton Utara ataupun

dengan melibatkan unsur tokoh Muspida sebagai penghubung kepada masyarakat disamping itu penggunaan media sosial seperti Facebook lebih efisien untuk menyebarkan informasi pembangunan daerah karena kebanyakan masyarakat telah mempunyai akun *Facebook*.” (Wawancara 12 November 2016)

Sama halnya dengan Bapak Fr, masyarakat Kabupaten Buton Utara menyatakan bahwa:

“Penyebarluasan informasi pembangunan di Buton utara khususnya di ibukota Kabupaten sudah cukup baik dengan tersedianya berbagai jenis media massa dan adanya media elektronik termasuk layanan internet, namun apa yang ada di ibukota kabupaten Buton Utara tidak sama dengan apa yang ada di pelosok-pelosok desa di kabupaten Buton Utara, disana sangat minim media massa maupun elektronik, jangankan untuk mengakses informasi pembangunan yang ada di Buton Utara untuk menelpon saja sangat sulit”. (Wawancara 12 November 2016)

Dengan adanya media informasi yang digunakan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara tersebut diharapkan dapat memperlancar arus komunikasi dua arah yang saling memberikan *feedback* antara pemerintah dan masyarakat.

Pendekatan Kerjasama

Selain menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif, Bidang Komunikasi dan Informasi Kabupaten Buton Utara juga melakukan pendekatan kerjasama. Pendekatan kerjasama merupakan upaya Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam membina hubungan yang harmonis antara organisasi

dengan berbagai pihak luar maupun dalam, untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan untuk menunjang transparansi informasi daerah. Dalam pendekatan kerjasama, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara bekerja sama dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dari tiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara. Pendekatan kerjasama ini mutlak diperlukan untuk menyebarkan informasi pembangunan terutama untuk menjangkau masyarakat awam yang belum atau tidak mengerti teknologi, seperti halnya Ibu Suaidah, seorang ibu rumah tangga yang di kabupaten Buton Utara. Ibu Su menyatakan bahwa:

“Saya yang hanya masyarakat awam yang profesinya hanya sekedar ibu rumah tangga kadang terlambat bahkan tidak mengetahui penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Kadang untuk mendapatkan informasi terbaru saja saya sering terlambat karena saya tidak terlalu bisa menggunakan teknologi. Boro-boro menggunakan teknologi, menggunakan hape saja hanya untuk sms dan menelpon. Jadi kalo menurut saya penyebaran informasi itu akan lebih cepat dan lebih baik jika disampaikan kepada orang yang berwenang di masyarakat seperti pemuka adat, tokoh-tokoh masyarakat, camat, lurah, kepala desa, ataupun RT, dimana orang seperti saya dapat memperoleh informasi dengan cepat. Penyebaran informasi juga harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk kepentingan masyarakat jadi masyarakat mengetahui informasi tentang yang terjadi di daerahnya beserta pembangunan apa saja yang terjadi di Buton ini”. (Wawancara 12 November 2016)

Pendapat ini didukung oleh Ru, seorang buruh di Kabupaten Buton Utara yang berpendapat sebagai berikut:

“Kalo menurut saya, penyebarluasan informasi tentang pembangunan di Butur masih belum mencapai kepada desa-desa yang ada diwilayah Butur. Kadang saya sendiri merasa terlambat mendapatkan informasi terutama tentang apa yang terjadi di Butur. Informasi yang saya dapatkan biasanya dari mulut ke mulut tentang apa yang terjadi. Saya juga tidak terlalu sering membaca koran atau mendengarkan radio. Jadi akses informasi yang saya dapatkan berasal dari teman atau keluarga yang biasanya memberitahukan kepada saya apa yang sedang terjadi di Butur dan sekitarnya ini”. (Wawancara 12 November 2016)

Pendapat yang lain pun disampaikan oleh Bapak Ld. S, masyarakat Kabupaten Buton Utara yang berpendapat:

“Sesuai dengan apa yang saya ketahui bahwa kerjasama dalam penyebarluasan informasi tentang pembangunan di Butur masih belum bagus karena jaringan yang dipakai hanya jaringan internet, tidak menggunakan jaringan Telkom seperti yang ada di Kota Baubau atau daerah lainnya, herannya sampai sekarang belum ada PT. Telkom di Buton Utara, harusnya Pemerintah

segera melakukan lobi-lobi agar Telkom ada di Buton Utara dan masyarakat punya pilihan mau menggunakan warnet atau data seluler untuk akses informasi pembangunan Buton Utara”. (Wawancara 12 November 2016)

Selain melakukan kerjasama antar instansi, Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara dan Bidang Komunikasi dan Informasi pemerintah juga menjalin kerjasama kemitraan dengan media massa dan *pers*. Contoh adanya pelayanan kepada wartawan/*pers* baik cetak maupun elektronik dalam rangka peliputan dan publikasi serta melakukan kunjungan jurnalistik untuk mengeksplor wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Buton Utara.

Dengan demikian, pendekatan kerjasama yang dilakukan tersebut diharapkan menjadi alat bantu Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara di bidang Komunikasi dan Informasi Kabupaten Buton Utara dalam proses transparansi informasi daerah, agar sama-sama membantu menyampaikan informasi pembangunan daerah baik mengenai kegiatan pembangunan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Public Relation (PR) Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam Menunjang Transparansi Informasi Daerah, menjalankan perannya sebagai berikut: (1) Penasihat Ahli (*Expert Prescriber*). (2) Fasilitator Komunikasi (*Commentator Facilitator*). (3) Fasilitator

Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Facilitator*).

Selain peran tersebut di atas Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara melakukan cara lain guna melancarkan peran mereka, diantaranya yaitu melakukan: (1) Pendekatan Edukatif dan Persuasif; serta Pendekatan Kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukmianto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Arifin, Indar. 2010. *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik di Kabupaten Wajo*. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Damayanti, Whanty. 2006. *Peranan Pemerintah dalam Meningkatkan Kecerdasan Anak Didik Pada Lembaga Pendidikan Swasta di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*. Program Studi Ilmu Pemerintahan: Universitas Hasanuddin.
- Fahrudin, Adi. *Pemberdayaan, Partisipasi, dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Humaniora: Bandung.
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Hasbullah. 2010. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penulisan Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. UII Press: Yogyakarta.
- Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa depannya*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Nasution, S. 2010. *Sosiologi Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Rochaety Ety,dkk. 2005. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Cetakan Pertama. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Mandar Maju: Bandung.
- Sindhunata. 2000. *Menggagas Paradigama Baru Pendidikan "Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Kansius: Yogyakarta.
- Soetrisno dan SRDM Rita Hanafie. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penulisan*. C.V Andi Offset: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat "Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial"*. Refika Aditama: Bandung.
- Suhendra K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta: Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Sumarjono, Selo. 1974. *Sistem Sosial Indonesia*. Rineka Cipta: Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. PT Refika Aditama: Bandung.

- Tilaar, A, R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Cetakan Pertama. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Oktaviana, Nani. 2008. *Tesis Analisis Pendidikan dan Pelatihan Dalam Pengembangan Karir Pegawai pada Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah*. Program Pascasarjana. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Walgito, Bimo. 1999. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. C.V Andi Offset: Yogyakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.